

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE* AL-JARMH AL 'AMD  
(STUDI KASUS KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN  
ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH )**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

**TARMIZI DAHMI**  
**NIM 0205163146**



**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)  
FAKULTAS SYARI'AHN DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Tarmizi Dahmi

NIM : 0205163146

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JURUSAN : Jinayah

JUDUL : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
*RESTORATIVE JUSTICE AL-JARMH AL 'AMD* (STUDI KASUS  
KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA  
PROVINSI ACEH )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 03 Oktober 2020

TARMIZI DAHMI  
**NIM. 0205163146**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

:TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE*  
*AL-JARMH AL'AMDI* (STUDI KASUS KECAMATAN LAWE ALAS  
KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH )

Oleh :

**TARMIZI DAHMI**

NIM. 0205163146

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**M.Rizal, SH, M.Hum**  
NIP.19650716 199403 1 003

**Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP.19810828 200901 1 011

**Mengetahui,**

**Ketua jurusan**

**Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum**  
NIP.19810828 200901 1 011

## MOTTO

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٥﴾

....Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016) h. 115

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati penulis yang paling dalam penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis,

1. Kepada Ayah,mamak dan Nenek yang paling penulis cintai mereka adalah orang tua terhebat yang telah mendidik dan membesarkanp penulis dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga penulis bisa melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan diberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.
2. Kepada adik penulis yang selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Mala Hayati yang terus mensupport penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan cepat dan tepat
4. Kepada Sahabat-sahabat penulis di perantauan yaitu junaidi dirhan dan wahyu ansyahriza yang setia menemani baik suka dan duka yang banyak di lewati yang tidak dapat disebutkan satu persatu
5. Teman-teman seperjuangan penulis stambuk 2016 yang selalu memberi dukungan dan do'a selama di bangku perkuliahan. Kenangan bersama kalian tidak terlupakan. Terima kasih supportnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### **Vokal Pendek**

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafîqa*.

صَلَحَ ditulis *saluha*.

### **Vokal panjang**

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang di tulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a  
فَالَا ditulis *fala*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i  
مِثَاقِ ditulis *misaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u  
أُصُولِ ditulis *usul*

### **Vokal Rangkap**

4. Fathah + Ya' mati ditulis ai  
الْأَحْيَايِ ditulis *az-Zuhaili*
5. Fathah + Wawu mati ditulis au  
طَوْقِ ditulis *tauq*

### **Ta' Marbutah di Akhir Kata**

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : رَوْضَةُ الْجَنَّةِ ditulis *Raudah al-Jannah*

### **Hamzah**

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.  
اِنَّ ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').  
وطء ditulis *wat'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.  
ربائب ditulis *raba'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').  
تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

### **Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.  
البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.  
النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan : yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.



## IKHTISAR

Kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara merupakan salah satu daerah yang menerapkan hukuman pidana tertentu dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan (*retorative justice*), *Restorative justice* sendiri pada prinsipnya merupakan salah satu teori pemidanaan dengan mengedepankan penyelesaian kasus pidana secara kekeluargaan tanpa mengenyampingkan kepentingan korban, terbukti dengan adanya hukuman untuk seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja yang menyebabkan luka dengan hukuman denda dengan jumlah tertentu yang telah di sepakati dalam sidang di balai desa atau tempat yang di tunjuk oleh kepala desa, dalam penyelesaian suatu perkara pidana hukuman yang di jatuhkan sesuai dengan perbuatannya seperti denda berat yaitu pelukaan yang di buat bagian kepala, denda menengah yaitu pelukaan yang di buat di bagian di bawah leher hingga pinggang dan denda ringan untuk pelukaan di bagian pingang hingga kaki, dalam islam penyelesaian kasus pidana penganiayaan sengaja yang di maafkan adalah *diyat*/denda dengan adanya hukuman tersebut di harapkan tujuan *restorative justice qisas* itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Dari pembahasan di atas penulis menarik rumusan masalah yaitu (1) bagaimana terjadinya *al-jarmh almd* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh ? (2) bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap *restorative justice* ?. dan bagaimana penerapan *restorative justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara ? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research* (study kepustakaan) dan *field reseach* (penelitian lapangan) obyek penelitian di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara perovinsi aceh. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi KA camat, imum mukim, *penghulu*, imam, khatib, bilal, ketua adat ,kadus dan masyarakat kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara dalam menentukan hukuman *diyat* bagi masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah di tetapkan kemudian menerapkan sanksi yang lebih realistis dan maslahat. Dasar hukum yang digunakan di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam yaitu penganiayaan sengaja dihukum *diyat* bukan lagi *qisash* atau di had karena unsur-unsur dan syarat-syarat *diyat* sudah terpenuhi akan tetapi dalam penyerahan *diyat*nya tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam. *Diyat* di kecamatan lawe alas kabupatn aceh tenggara di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara menggunakan ta'zir dalam artian *restorative justice* bukan menggunakan *diyat* dalam artian ganti rugi

**Kata kunci : Restorative justice, diyat dan ta'zir**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “:TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE AL-JARMH AL’AMDI* (STUDI KASUS KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH )” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi yang mulia Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada ayah hakimin dan Ibunda latipah yang telah membimbing, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang. Karena mereka Skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dan kepada saudara kandung saya bayu dan abit yang telah memberikan doa dan perhatiannya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
8. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Bapak M.Rizal,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan , arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini
10. Ibuk Dr.Sukiati,S.Ag, MA selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama berada dibangku perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.
12. Kepada sahabat seperjuangan Jurnal Remponk, yang telah bersama-sama dalam duka dan suka sejak dalam berada dibangku perkuliahan.
13. Kepada Sahabat wahyu ansyahriza, junaidi dan siti nur annisa hendra siregar yang telah memberikan doa, perhatiannya dan semangatnya selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tidak banyak yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika selama empat tahun lebih ini dalam kebersamaan ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
15. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Penulis,

**Tarmizi Dahmi**  
NIM. 0205163146

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Kerangka Teoritis .....	12
H. Hipotesis .....	15

I. Metode Penelitian .....	17
J. Pengumpulan Data .....	17
K. Sistematika Penulisan .....	19
 <b>BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	 <b>21</b>
A. Tindak Pidana .....	21
1. Defenisi Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	25
B. Penganiayaan .....	25
1. Defenisi Penganiayaan .....	25
2. Unsur-Unsur Penganiayaan .....	30
3. Macam-Macam Penganiayaan .....	33
4. Sanksi-Sanksi Penganiayaan .....	42
C. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana .....	41
1. Pengertian <i>restorative justice</i> .....	41
2. Pendekatan <i>restorative justice</i> .....	44
3. Prinsip-prinsip keadilan restorative.....	46
4. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Kecamatan Lawe Alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh .....	47
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA .....</b>	 <b>47</b>

A. Gambaran Umum Kecamatan Lawe Alas .....	52
B. Posisi Geografis Kecamatan Lawe Alas .....	54
C. Struktur Pemerintahan Kecamatan Lawe Alas .....	56
D. Jumlah Penduduk Kecamatan Lawe Alas .....	63
 <b>BAB IV ANALISIS PEMBERLAKUAN <i>RESTORATIVE JUSTICE AL-JARMH AL'AMD</i> DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGARA PROVINSI ACEH.....</b>	<b>67</b>
A. Landasan Hukum Pemberlakuan <i>Restorative Justice Al-Jarmh Al'amdi</i> Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	67
B. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan .....	72
C. Analisa Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Sengaja Di Daerah Masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara .....	73
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
 <b>DAPTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	halaman
1.1 geografis desa dan tinggi di atas permukaan laut menurut desa di kecamatan lawe alas .....	50
2.1 prangkat kantor camat kecamatan lawe alas tahun .....	51
2.2 nama mukim, kepala mukim dan nama desa di kecamatan lawe alas tahun .....	53
2.3 Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun Dan Nama Kepala Dusun Di Kecamatan Lawe Alas Tahun 2020 .....	53
2.4 Jarak Desa di Kecamatan Lawe Alas terhadap Kantor Camat, Kantor Polsek dan kantor Koramil (Km) .....	57
2.5 Fasilitas Yang Dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dirinci Perdesa dalam kecamatan lawe alas.....	57
3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Lawe Alas.....	59
3.2 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Lawe Alas .....	60
3.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lawe Alas .....	61
4.1 pelanggaran ringan.....	68
4.2 pelanggaran penengah.....	68
4.3 pelanggaran berat.....	68
4.4 hasil analisis para ketua MA aceh tenggara .....	69



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama suci yang di bawa oleh nabi Muhammad SAW. Seabagai agama yang *rahmatan lil alamin*, bukan hanya sekedar membahas masalah ibadah tetapi lebih jauh membahas masalah hukum sebagai petunjuk sekaligus sebagai pelajaran bagi manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati indahnya sebuah kehidupan hal ini terbukti dengan di syariatkannya islam (*maqasid asyariah*) di jaganya hak-hak alami dalam diri manusia.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti melindungi eksistensi kehidupan manusia yang alami. Oleh karenanya islam sangat menghargai jiwa manusia, sebagai agama yang universal dan islam juga mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut dan jika dibiarkan maka lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan /kriminalitas.Kejahatan merupakan semua bentuk, ucapan, perbuatan dan tingkah

laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, agama dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).<sup>2</sup>

Hukum sebagai panglima tertinggi dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara di harapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat karena sejatinya dengan adanya hukum masyarakat menjadi teratur, disiplin dan harmonis karena ada karena ada pelindung yang dapat membuat mereka merasa aman.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
3. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti perbuatan anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.

Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap pelanggar hak-hak perorangan, yang dalam hal ini adalah tindakan kejahatan yang

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990), h. 38.

<sup>3</sup> Abd Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 28.

merugikan berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan. Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*.<sup>4</sup>

Keberadaan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan merupakan tujuan *maqasid al-dharuriyyah*,<sup>5</sup> yaitu untuk memelihara jiwa agar tercapai maksud semula tanpa menimbulkan akses yang berlebihan dan permusuhan baru, serta mewujudkan keberlangsungan kehidupan manusia, maka oleh karena itu Allah SWT. mensyari'atkan hukum *qisash* dan *diyat* bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan tersebut mengandung lima unsur pokok yang harus dicapai untuk kemaslahatan manusia yaitu: menjamin kebebasan beragama *Hifdz al-dien*, memelihara kelangsungan hidup *Hifdz al-nafs*, menjamin kreatifitas berfikir *Hifdz al-'aql*, menjamin keturunan dan kehormatan *Hifdz al-nasl*, pemilikan harta, properti dan kekayaan *Hifdz al-amal*.

Dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana penganiayaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja sesuai dengan ayat al-qur'an :

#### 1. Di hukum dengan *qisash*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ ....

<sup>4</sup> A. Djazuli, *fiqh jinayah*, (Jakarta : raja grafindo persada, 1997), h. 25

<sup>5</sup> Syukri albani, *filsafat hukum islam*. cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.108

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita... (Al-baqarah [2] : 178)<sup>6</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ  
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>٧</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا  
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.(Q.S. Al-maidah: [5] : 45)<sup>7</sup>

Adapun dalil dari as-Sunnah, Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ

“Siapa menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memiliki dua pilihan: bisa memilih diyat, dan bisa juga membunuh (memintaqishash).” (HR.tirmidzi no. 1409).<sup>8</sup>

## 1. Di hukum dengan diyat

<sup>6</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h.28

<sup>7</sup> Dapertemen Agama RI, h.115

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2013), H. 280

Di samping mensyariatkan hukuman *qisas*, islam juga menyarankan kepada umat-nya agar mengedepankan sifat pemaaf. Dan pelaksanaa pemberian maaf itu berlangsung sampai vonis *qisas* di jatuhkan secara adil. Ajaran ini semata-mata merupakan ajakan untuk berbuat kebajikan, bukan suatu ketetapan yang mengenyampingkan fitrah manusia serta mendorongnya berbuat sesuatu di luar batas kemampuannya. Allah Swt. Berfirman,

... فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَا  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Al-baqarah [2] : 178)<sup>9</sup>*

Allah swt. Dengan syariat-nya yang sangat bijaksana ini, benar-benar telah mengalihkan bentuk-bentuk hukuman sebagai siksaan kepada makna hukuman yang lebih baik dan agung nilainya, sebab hukuman-hukuman di masa lampau berfungsi sebagai siksaan, yaitu siksaan dari pihak keluarga terbunuh kepada si pembunuh.<sup>10</sup> Dari penjelasan di atas jelas sekali ada proses pengalihan bentuk-bentuk hukuman perbuatan pidana yang di hukum *qisash* menuju hukuman *diyat* sehingga yang di paparkan di atas sama persis seperti bentuk *Restorative justice*.

<sup>9</sup> Dapertemen Agama RI, h.178

<sup>10</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 1, Cet-Ke 1, (Depok:Keira, 2016) H. 187-188

*Restorative justice* merupakan pemulihan kerugian dan penderitaan terhadap korban. Dimana korban dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. *Restorative justice* dikemukakan untuk menolak sarana koersif<sup>11</sup> dan menggantinya dengan sarana *reparative*.<sup>12</sup>

*Restorative justice* mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *Restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.<sup>13</sup>

Hukum yang ada sekarang ini merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu di bina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum di ciptakan. Ide-ide tersebut adalah ide mengenai

---

<sup>11</sup> Koersif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni bersifat atau berkenaan dengan koersi. Arti dari koersi sendiri adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Sehingga bisa diartikan lebih condong pada pemaksaan.

<sup>12</sup> Reparatif adalah perbaikan, atau cenderung untuk memperbaiki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemui kata reparasi yang artinya perbaikan atas kerusakan.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016) h.108.

keadilan.<sup>14</sup> Sedangkan hukum pidana pada dasarnya merupakan ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan suruhan atau larangan terhadap perbuatan-perbuatan di mana apabila suruhan atau larangan itu dilanggar artinya dipenuhi rumusan deliknya, akan mengakibatkan sanksi.<sup>15</sup>

Munculnya pelanggaran norma hukum di kecamatan lawe alas berupa gangguan ke amanan dan ketertiban bermasyarakat sering terjadi di kalangan muda mudi di daerah tersebut hal ini timbul karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang merasa hebat lantas menganggap dirinya paling berkuasa di daerah tersebut yang menimbulkan sikap arogan tidak jarang terjadi penganiayaan secara sengaja dan mengakibatkan luka fisik maupun psikis.

Dari aspek pidana jelas mereka memenuhi unsur pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman hukumannya bisa maksimal dua tahun dan denda tiga ratus rupiah, jika di lihat dari hukum pidana islam jelas hukumannya adalah di *qisash* atau *diyat* jika korban memaapkan pelaku . jika di telisik lebih dalam lagi ada tatanan nilai *Restorative justice* yaitu proses pengalihan pidana *qisash* menuju *diyat* yang terjadi antara korban dan pelaku.

Tatanan nilai tersebut tidak ada di dalam KUHP yang hanya mengedepankan pada *teori absolut* yaitu pidana di jatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 18

<sup>15</sup> Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.30

<sup>16</sup> Arief nawawi barda dan muladi, *teori-teori dan kebijakan pidana* cet.2010 (P.T.ALUMNI: bandung,2010) h.10

Dewasa ini dapat di lihat perlahan lahan arah penyelesaian kasus pidana yang mula-mula pada aspek pembalasan menuju ke arah yang lebih mengedepankan pada proses perdamaian seperti dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak Dan Perkap No 6 Tahun 2019 penyidikan tindak pidana dapat di lihat bahsawasannya Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restorative*, apabila terpenuhi syarat-syarat formil dan materil seperti kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak komplik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, adanya prinsip pembatas pada pelaku tindak pidana seperti tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis sedangkan tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan sebelum SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) di kirim ke penuntut umum.

Sedangkan sarat materil meliputi surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor, surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative*, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian



keadilan *restorative* dan pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.<sup>17</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, menurut hemat penulis dengan peratuturan yang sudah seyogyanya dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, tapi di sisi lain di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh sudah menerapkan *Restorative justice*.

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah penyebab terjadinya *al-jarhm al'amdi* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh dan melihat apakah *Restorative justice* yang di terapkan di masyarakat tersebut sesuai dengan hukum pidana islam mengingat aceh mempunyai otonomi khusus dalam hal penerapan syariat islam.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE AL JARMH AL'AMDI* (STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana terjadinya *al jarmh al'amdi* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap *Restorative justice* ?

---

<sup>17</sup> Lihat Perkap No 6 Tahun 2019

3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice Al Jarhm Al Amdi* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh ?

### C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Restorative Justice Al Jarhm Al ‘Amdi* (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh) dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Memaparkan tentang kejahatan penganiayaan sengaja
2. Pengertian tindak pidana penganiayaan sengaja
3. Pengertian *Restorative justice*
4. Hukuman tindak pidana penganiayaan sengaja
5. Factor-faktor terjadinya penganiayaan sengaja
6. Tinjauan hukum pidana islam terhadap *Restorative justice*
7. penerapan *Restorative Justice Al Jarhm Al Amdi* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi Aceh

Batasan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana terjadinya *al jarhm al ‘amdi* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap *Restorative justice*
3. penerapan *Restorative Justice Al Jarhm Al Amdi* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi Aceh

### D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya *al jarmh al'amdi* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap *Restorative justice*
3. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice Al Jarmh Al Amdi* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi Aceh

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bisa dapat menjadi tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya sistem penegakkan hukum yang aturan dan jenis sanksinya berbeda dengan aturan pemerintahan serta peraturan yang berada di masyarakat umum.
2. Supaya dapat menjadi pertimbangan di masa yang akan datang tentang pembuatan RKUHP yang baru tentang penerapan *Restorative justice*
3. Untuk menambah wawasan ke ilmuan dalam khasanah hukum pidana islam

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap *Restorative justice al jarmh al'amdi* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh yang mana penulis belum menjumpai secara khusus mengkaji masalah ini, adapun yang membahas tentang *Restorative justice* yang di bahas oleh **Nor Soleh** dari UNISSULA semarang yang di mana bahasannya adalah “*Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di*

*Indonesia* dalam penelitian ini sudah terlihat pemberlakuan *Restorative justice* di hukum pidana islam pada jarimah *qisash* dan *diyat*. Pemaafan yang di berikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman *qisash*, meskipun di ikuti dengan *diyat*, yaitu ganti kerugian terhadap akibat kejahatan yang dapat di rasakan langsung oleh korban atau keluarganya.<sup>18</sup>

Dari paparan Nor Soleh dalam karyanya tersebut sudah memperjelas arah penulisan skripsi ini, di satu sisi tidak adanya regulasi yang membahas tentang detail yang harus di bayar yang dimana di masa masyarakat modern bisa jadi korban akan meminta bayaran yang sangat besar yang tidak sesuai dengan semestinya, oleh karenanya sangat berpotensi gagal dalam penerapan *Restorative justice* tersebut, penelitian ini akan melengkapi dari segi praktik *Restorative justice* di lapangan yang telah lama di terapkan oleh masyarakat di daerah tersebut serta kesesuaiannya dengan hukum pidana islam

#### **G. Kerangka Teoritis**

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Menurut *Simons*, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

---

<sup>18</sup> Nor Soleh ,”*restorative justice*,” ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam,vol.2.no 2 (juli-desember 2015) 123 di akses pada oktober 2020

diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan itu.<sup>19</sup>

Jika ditinjau dari hukum positif (KUHP) di Indonesia, dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindak pidana hukum atau tindak pidana Undang-Undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yaitu peristiwa yang hidup didalam keyakinan masyarakat terlepas dari Undang-Undang. Sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana Undang-Undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh Undang-Undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat.<sup>20</sup>

Dalam hukum islam ada dua istilah yang biasa di gunakan untuk tindak pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. kata *jarimah* biasanya perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara' yang di ancam Allah dengan hukuman *had qisash/diyat* atau ta'zir. sedangkan *Jinayah* adalah perbuatan yang di larang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Tetapi kebanyakan fuqaha' menggunakan istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, atau harta atau selain itu.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana islam ada tiga kriteria sanksi yaitu *hudud*, *qisash/diyat* dan ta'zir, pada kasus penganiayaan sangksi hukumnya adalah *qisash/diyat*, Di tinjau dari segi niat pelakunya, tindak pidana

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung : Asy Syamil, 2001), h. 132

<sup>20</sup> Van.J.Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 342

<sup>21</sup> Ahmad djazuli , *fiqih jinayah* (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam), (Jakarta: PT raja grafindo persada ,1997, h. 1

penganiayaan di bagi menjadi dua bagian :<sup>22</sup> Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja dan Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Tindak pidana penganiayaan sengaja menurut *abdul qadir audah* adalah melawan hukum<sup>23</sup> maksudnya ialah seorang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka, tersakiti. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya atau seseorang dengan sengaja memukul seseorang agar pukulannya membuat orang merasa sakit. Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah ialah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada *Khalifah* atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut<sup>24</sup> :

---

<sup>22</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 204

<sup>23</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 162

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, h. 249-272.

1. Sanksi hukuman mati
2. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
3. Penjara
4. Pengasingan
5. *Salib*, yaitu sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
6. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
7. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
8. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*-nya
9. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
10. Dan lain-lain

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>25</sup> Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

Terjadinya penganiayaan sengaja di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara merupakan hasil penegakan hukum yang kurang maksimal yaitu hukuman yang di berikan bagi penganiayaan sengaja di beri denda yang ringan dan mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut tidak mengindahkan peraturan yang ada karena penyelesaian kasus pidana tertentu menggunakan metode kekeluargaan atau biasa di sebut keadilan *restorative*.

Bahwasannya *restorative justice* menurut tinjauan hukum pidana islam adalah suatu penyelesaian kasus pidana kearah yang lebih relepan yaitu dengan mengalihkan dari konsep yang terbilang ekstreem menuju hukuman yang lebih mengarah kepada proses dalam hal ini konsepny adalah proses dari qisash menuju diyat/denda

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan sengaja melalui *Restorative justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh merupakan suatu penyelesaian perkara pidana dengan cara *restorative justice* dengan membayar denda bagi korban tindak pidana yang menurut penulis sesuai dengan *restorative justice* menurut hukum pidana islam yang apa bila korban memaafkan pelaku tindak pidana akan jatuh denda tertentu kepada pelaku

## **I. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*filed*



*reseach*), sehingga dengan ini akan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini baik berupa buku, artikel maupun opini.<sup>26</sup> Serta dari data-data yang didapat dari Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh .

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* dan *normative*. *Deskriptif* analisis adalah metode yang bertujuan menjelaskan secara sistematis atau prosedur perpecahan masalah yang akan diteliti sesuai fakta-fakta lapangan yang tampak sebagaimana adanya. Dan normatif adalah meneliti hukum yang diterapkan di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tanggara provinsi aceh yang di tinjau dari hukum pidana Islam

## 3. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung, yaitu dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan, maksud nya ialah melihat langsung keadaan sesungguhnya, yaitu pelaksanaan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku penganiayaan sengaja

### b. Metode Interview

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), h. 11

Penulisan menggunakan metode interview untuk mengetahui data-data yang ada di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh . Data-datanya berupa faktor pendukung berlakunya *Restorative justice*, media yang digunakan disini ialah sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut media perkumpulan atau ruangan sementara untuk di di gelarnya *Restorative justice*

Metode ini berbentuk interview berencana maksudnya intirview yang sudah tersusun dan biasa nya metode interview berencana ini sudah terlebih dahulu menentukan objek apa yang akan diwawancarai. Objek penelitiannya yaitu:

- 1) Camat
- 2) Kepala desa
- 3) Ketua adat
- 4) Imum mukim, katib, bilal
- 5) Kepala dusun
- 6) Masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dengan cara pengumpulan data menggunakan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, misalnya struktur kepemimpinan camat lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh

- 1) Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian.

Bab II, akan memaparkan tentang pengertian penganiayaan sengaja dan konsep hukum pidana Islam tentang penganiayaan sengaja. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian hukum penganiayaan, dasar syari'atnya, jenis dan macam-macamnya, dan hukumannya

Bab III, menjelaskan gambaran umum Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara provinsi aceh

Bab IV, berisi berupa analisa data yang diperoleh oleh peneliti dalam hal pemberlakuan *Restorative justice* bagi pelaku penganiayaan sengaja serta factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja analisa terhadap hukuman bagi pelaku penganiayaan sengaja di daerah masyarakat kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara dalam pandangan hukum pidana islam

Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-sara

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak pidana penganiayaan sengaja

##### 1. Definisi tindak pidana penganiayaan sengaja

Pada prinsipnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau *jarimah*, karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah atau *jarimah*.

Istilah *jarimah* mengacu pada hasil perbuatan/tingkah laku seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang di larang.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 169

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”(QS.al-Baqarah(2):169)<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 1.

<sup>28</sup> Dapertemen Agama RI, h. 25

Dan juga dalam QS. al-An'am (6): 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ  
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا  
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". (QS. al-An'am (6): 151)<sup>29</sup>

demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya),

Beberapa pendapat ulama tentang jarimah :

- a. Menurut al-Mawardy, kata *jarimah* diartikan sebagai berikut:  
*"Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta'zir"*.<sup>30</sup>
- b. Menurut Abd al-Qadir 'Awdah, kata *jarimah* diartikan sebagai berikut: *"Jarimah ialah sebutan bagi perbuatan yang diharamkan*

<sup>29</sup> Dapertemen Agama RI, h. 148

<sup>30</sup> Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960),h. 219.

*oleh syara', baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.”*<sup>31</sup>

- c. Menurut Sayyid Sabiq, kata *jarimah* diartikan sebagai berikut:  
*“Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.”*<sup>32</sup>

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana di atas, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had maupun *ta'zir*.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Umum (*al-arkan al-'amm*), yaitu unsur-unsur yang harus

ada pada setiap *jarimah* yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'y*), yaitu adanya nash,

---

<sup>31</sup> Abd al-Qadir Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 4.

<sup>32</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet. II, 1987), h. 7

yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.

2) Unsur materiil (*al-rukn al-mady*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.<sup>33</sup>

b. Unsur Khusus (*al-arkan al-khass*), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada *jarimah* mencuri tidak pada *jarimah* lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada *jarimah* zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada *jarimah* zina tidak pada *jarimah* lainnya.<sup>34</sup>

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap *jarimah*. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 3

<sup>34</sup> Ibid, h.12.

<sup>35</sup> Ibid, h. 13.

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:<sup>36</sup>

- a. Orang gila sampai ia sadar;
- b. Anak-anak sampai usia puber, dan
- c. Orang yang tidur sampai ia bangun

### 3. Macam-macam tindak pidana

Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jarimah* dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau *jarimah* dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.<sup>37</sup>

Para Ulama mengelompokkan *jarimah* dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

- a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.

---

<sup>36</sup> Abdur Rahman I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15.

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: BulanBintang, 1990), h. 6-7



- b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum-minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.
- c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
- d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.<sup>38</sup>

Apabila ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. *Hudud*, yaitu kejahatan atau *jarimah* yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum minuman keras, makar atau pemberontakan dan murtad, *Abd al-Qadir Audah* mengartikan *jarimah* hudud sebagai *jarimah* yang dihukum

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Preda Media, 2003), h. 257

dengan hukuman hudud yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi.

- b. *Qisas Diyah*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyah*), yang termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan bagian anggota tubuh.
- c. *Ta'zir*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *hudud* dan tidak pula dengan *qisas-diyah*, dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

Selanjutnya ia juga mengartikan *jarimah qisas-diyah* sebagai perbuatan *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *qisas* dan hukuman *diyah*, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi menjadi hak perseorangan, maksudnya apabila korban memaafkan pelaku *jarimah* maka hukuman tersebut menjadi hilang atau hapus.

Demikian juga ia mengartikan *ta'zir*, sebagai perbuatan *jarimah* yang dihukum dengan *ta'zir*, yaitu memberikan pengajaran (*al-adaby*), sedangkan batasan hukumannya tidak ditentukan, demikian pula tentang macam-macam *jarimah*nya. Dalam hal ini hakim atau pemerintah diberi kebebasan atau kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jenis *jarimah ta'zir* serta dengan memperhatikan pelaku *jarimah*nya.

Adapun jenis-jenis kasus *ta'zir* secara umum dibagi dalam 7 jenis berikut ini :<sup>39</sup>

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran terhadap kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi, dan
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.

Apabila ditinjau dari aspek niat pelaku, maka *jarimah* dibagi menjadi *jarimah* sengaja dan *jarimah* tidak sengaja.<sup>40</sup> *Jarimah* sengaja pelakunya tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh syara' dan akan mengakibatkan hukuman apabila dikerjakan, sedangkan Abd al-Qadir Audah mengartikan *jarimah* tidak sengaja sebagai *jarimah* yang dilakukan tidak sengaja oleh pelakunya dan perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruannya

## **B. Penganiayaan**

### **1. Definisi penganiayaan**

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan

---

<sup>39</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 284.

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 7.

tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’dbadanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.<sup>41</sup>

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>42</sup>

## 2. Unsur-unsur penganiayaan

Suatu *jarimah* pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.7.

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),h.5.

- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan, Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - 2) Luka pada tubuh.

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 10.

c. Motivasi kejahatan disengaja.

d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.<sup>44</sup>

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akal nya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qisas* atau *hudud* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akal nya. Sedangkan orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sehat akal nya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.<sup>46</sup> Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

<sup>45</sup> Ibid, h.131

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahtid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, (Semarang: As-Syifa', 1990), h. 551.

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan *jarimah* tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qisas*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qisas*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.<sup>48</sup>

Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qisas* atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat *diquisas* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka *diquisas*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *z'immi* maka ia juga tidak dapat *diquisas*, melainkan membayar *diyah* sebab darah seorang kafir *dhimmy* lebih rendah dari darah seorang muslim.<sup>49</sup> Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dhimmy* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 555

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, h. 75.

### 3. Macam-macam Penganiayaan

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

#### a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut *Abd al-Qadir Audah* tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.<sup>50</sup> Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya.

Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut *Abd al-Qadir Audah* adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.<sup>51</sup> Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang

---

<sup>50</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 204.

<sup>51</sup> Ibid. h. 204



melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja.<sup>52</sup>

Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>53</sup>

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

---

<sup>52</sup> Ibid. h. 204

<sup>53</sup> Ibid.h.205

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.<sup>54</sup>

#### 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.<sup>55</sup> Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

#### 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh. Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi- fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

#### 3) *Al-Shajjaj*

---

<sup>54</sup> Ibid. h. 206

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 185

*Al-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*.

Menurut Imam Abu *Hanifah*, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.<sup>56</sup>

Imam Abu Hanifah *membagi Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Bazi'ah*.

---

<sup>56</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 206

- f) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.<sup>57</sup>
- l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.
- m) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.

---

<sup>57</sup> Ibid. h. 206

n) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq*,<sup>59</sup> *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

*Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Nisa’ ayat : 92 )<sup>60</sup>*

<sup>58</sup> Ibid. h. 207

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , h. 10.

<sup>60</sup> Dapertemen Agama RI, h.93

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :...siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya  $\frac{1}{2}$  diyah, ubun-ubun diyahnya  $\frac{1}{3}$ , luka yang tembus kedalam diyahnya  $\frac{1}{3}$ , pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”<sup>61</sup>

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqoha' telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan mudihah yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari mudihah dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. Fuqaha' telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari mudihah tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos

---

<sup>61</sup> Abu Dawud al-Sijistany, Sunan Abu Dawud, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 193.

dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari mudihah.<sup>62</sup>

Untuk pelukaan mudihah (luka tampak tulang) Fuqoha' telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka hal-imah (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka munaqqilah dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka ma'mumah (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyah, luka ja'ifah dikenakan 1/3 diyah.

Sedangkan diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyah bibir dikenai 1 diyah penuh, tiap-tiap bibir ½ diyah, dua telinga dikenai 1 diyah penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya ¼ diyah, kedua 3 belah pelir dikenai 1 diyah penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyah, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyah penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyah penuh, jari jemari masing-masing dikenakan diyah 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyah 5 ekor onta.

### 3) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Adalah penganiayaan yang tidak sampai merusak *atraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka *syajja* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau

---

<sup>62</sup> Ibnu rusyd, bidayatul mujtahid, jilid 3, h.583

badan. Namun tidak menyebabkan luka, tetapi hanya rasa sakit atau memar saja.<sup>63</sup>

Ulama Hanafiyah tidak menggolongkan pelukaan ini sebagai *qisas* namun pada *ta'zir* saja. Sebab pelukaan ini hanya mengakibatkan memar saja, dan tidak sampai mengakibatkan luka pada *atraf* atau menghilangkan fungsinya, dan tidak menimbulkan luka *syajja* ataupun *jirah*.

### 3. Sanksi-sanksi penganiayaan.

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Sanksi hukuman mati
- b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta

---

<sup>63</sup> Ibid. h. 208

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, h. 249-272.



- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*-nya
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
- j. Dan lain-lain.

### C. *Restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana

#### 1. Pengertian *restorative justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>65</sup>

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*.<sup>66</sup> (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

---

<sup>65</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti: 2009 Jakarta, h. 1.

<sup>66</sup> *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, h. 6.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>67</sup>

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>68</sup> Sedangkan Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>69</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode

---

<sup>67</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers: 2007 London, h. 27.

<sup>68</sup> Eva Achjani Zulf, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2009, Jakarta, h. 65.

<sup>69</sup> Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *ajalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).h. 3

sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>70</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>71</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

---

<sup>70</sup> Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, (Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, : 2005,Bangkok-Thailand), h. 2-3.

<sup>71</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>72</sup>

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

## **2. Pendekatan keadilan *restorative justice***

---

<sup>72</sup> G. Widiartana, *Op. Cit*, h. 42

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>73</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan

---

<sup>73</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika: 2014, Jakarta, h. 157.

peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>74</sup>

### 3. Prinsip-prinsip keadilan *Restorative Justice*

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut *Adrinus Meliala* adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

---

<sup>74</sup> *Ibid*,h.158

#### 4. Dasar Penerapan *Restorative Justice* Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh

*Restorative Justice* atau yang sering di kenal dengan keadilan *restorative* merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul di era tahun 1960-an. Model pendekatan ini diasumsikan sebagai pilihan paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana saat ini.<sup>75</sup>

*Restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang menitik beratkan pada prinsip pembalasan dan teori *neo klasik* yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada gagasan mengapa di adakan pemidanaan, hal ini lebih menekankan pada unsur pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. teori ini lebih tertuju pada perbuatan salah seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera , oleh karenanya sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar ia berubah.<sup>76</sup>

Muladi mendefinisikan keadilan *restorative* adalah suatu pendekatan terhadap keadilan yang berdasarkan pada dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan,

---

<sup>75</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Lubuk Agung; Bandung, 2010) h.1-2

<sup>76</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni; Bandung, 1984) h. 4

penyembuhan, dan "*inclusiveness*" yang berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan *restorative* dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat yang terkena dampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dan reintegrasi.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia sudah mulai terlihat pada penyelesaian kasus perkara UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Dan Perkap No 6 Tahun 2019 penyidikan tindak pidana dapat dilihat bahwasannya Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *restorative*, di Aceh pada prinsipnya sudah melaksanakan *restorative justice* terbukti dengan adanya qanun-qanun yang ada, sedangkan di Aceh Tenggara penerapan *restorative justice* tertuang dalam Perbup Aceh Tenggara No 21 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa / perselisihan adat dan adat istiadat.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Lihat Perbup Aceh Tenggara No 21 Tahun 2015



Dalam Perbub No 21 Tahun 2015 tersebut tidak serta merta mengatur tentang perselisihan adat istiadat semata melainkan di dalamnya terdapat penyelesaian pada kasus pidana tertentu seperti ;

1. Perselisihan dalam rumah tangga ;
2. Khalwat mesum
3. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
4. Pencurian ringan
5. Pencurian ternah peliharaan
6. Penganiayaan ringan/perkelahian
7. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
8. Pelecehan ,fitnah,hasut,dan pencemaran nama baik ;
9. Pencemaran lingkungan (sekal ringan)
10. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
11. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
12. Perselisihan antar warga ;
13. Perselisihan tentang hak milik ;
14. Perselisihan harta seurikat ;
15. Kecelakaan lalulintas;
16. Pelanggran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan:
17. Persengketaan di pasar; dan
18. Perselisihan – perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat

Pada prinsipnya hukuman yang di buat menjadi pedoman untuk di taati dan di pegang teguh akan eksistensinya di masyarakat tak terkecuali di kecamatan lawe alas yang berupaya membina masyarakatnya menjadi pribadi yang ulet dan agamis dalam menjalankan hukum yang ada.

Dalam kajian ini penulis ingin melihat hukuman bagi pelaku penganiayaan yang ada lebih dalam lagi, jika di lihat dalam pasal 19 Perbup aceh tenggara No 21 Tahun 2019 sanksi bagi pelaku yang melanggar norma atau aturan sebagai berikut :<sup>78</sup>

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan maaf ;
4. Sayam;
5. *Diyat*;
6. Denda adat ;
7. Ganti kerugian;
8. Pengucilan;
9. Pengusiran; dan
10. Pencabutan gelar adat

Dalam sanksi tersebut terlihat jelas penerapan *restorative justice* yaitu pertama yang di lakukan adalah pendekatan yang melibatkan kekeluargaan ,pelaku dan korban.

---

<sup>78</sup> Lihat Perbup Aceh Tenggara No 21 Tahun 2015

## BAB III

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Lawe Alas

Secara umum kecamatan lawe alas berada di daerah kabupaten aceh tenggara yang Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"–4016'37" LU dan 96043'23'–98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km<sup>2</sup>.

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah”

Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh. Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowi I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah

Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 –sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional

Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng POKHKISEN, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.<sup>79</sup>

## **B. Posisi Geografis Kecamatan Lawe Alas**

Secara khusus posisi kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara terdiri atas :

Nama Kecamatan	: Lawe Alas
Nama Ibu Kota Kecamatan	: Pasir Bangun
Kabupaten	: Aceh Tenggara
Provinsi	: Aceh

---

<sup>79</sup> BPS kab.aceh tenggara dalam angka 2017

Luas Kecamatan : 1.027,10 Km<sup>2</sup>

Jumlah Desa : 28

Jumlah Mukim : 4

Tinggi Dari Permukaan Laut : ± 250 Meter

Batas-Batasan Kecamatan

Sebelah Utara : Kec. Babussalam Dan Darul Hasanah

Sebelah Selatan : Kec. Tanoh Alas

Sebelah Barat : Kec. Aceh Selatan

Sebelah Timur : Kec. Babel Dan Kec. Bukit Tusam

Table 1.1 Geografis Desa Dan Tinggi Di Atas Permukaan Laut Menurut Desa Di Kecamatan Lawe Alas

No	Desa	Geografis	Ketinggian Dari Permukaan Laut/Meter
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muara Baru	Bukan Pantai	144
2	Pasir Bangun	Bukan Pantai	137
3	Engkeran	Bukan Pantai	148
4	Lawe Kongkir	Bukan Pantai	145
5	Kubu	Bukan Pantai	161
6	Kuta Cingkam Ii	Bukan Pantai	150
7	Kuta Cingkam I	Bukan Pantai	140
8	Lawe Sempilang	Bukan Pantai	160
9	Kuta Batu Ii	Bukan Pantai	158
10	Kuta Batu I	Bukan Pantai	159

11	Prapat Batu Nunggul	Bukan Pantai	165
12	Pulo Sepang	Bukan Pantai	174
13	Paya Munje	Bukan Pantai	139
14	Darul Amin	Bukan Pantai	143
15	Lawe Lubang Indah	Bukan Pantai	134
16	Batu Hamparan	Bukan Pantai	195
17	Rih Mbelang	Bukan Pantai	183
18	Kute Batu Baru	Bukan Pantai	169
19	Rumah Kampung	Bukan Pantai	87
20	Pasekh Pekhmate	Bukan Pantai	139
21	Pasir Nunggul	Bukan Pantai	144
22	Lawe Kongkir Hilir	Bukan Pantai	148
23	Pulo Ndadap	Bukan Pantai	164
24	Pintu Khimbe	Bukan Pantai	165
25	Pulo Gadung	Bukan Pantai	150
26	Cingkam Meranggun	Bukan Pantai	138
27	Pasir Nunang	Bukan Pantai	146
28	Deleng Kukusen	Bukan Pantai	144

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka* 2017

### C. Pemerintahan Kecamatan Lawe Alas

Tabel 2.1 Prangkat Kantor Camat Kecamatan Lawe Alas Tahun

Jabatan	Nama	Golongan /Pangkat
(1)	(2)	(3)
Camat	Sudirmann SE	IV/a
Sekretaris Camat	Dedi Iskandar	III/d
Kasi Kessos	Suriati	III/b
Kasi Pelayanan Umum	Mirawati	III/d
Kasi PMD	Dedi Iskandar	III/d
Kasi Trantip	Madun Kamil	III/d
Kasi Pemerintahan	Juanda	III/c
Kasubbag Umum	Jabarulah	III/b
Kasubbag Kepegawaian	Kamidin Ishak	III/b
Kasubbag	Sarifin Desky	III/b



Keuangan		
Staf	Ahmad Sukri	II/b
	Abas	II/c
	Emiyana	III/a
	Susilawati	III/b
	Nova Yanti	III/b

Sumber : Kantor Camat Lawe Alas

Tabel 2.2 Nama Mukim, Kepala Mukim Dan Nama Desa Di Kecamatan Lawe Alas Tahun

Nama Mukim	Nama Kepala Mukim		Nama Desa
(1)	(2)		(3)
Biak Mentelang	Karimin	1	Pulo Gadung
		2	Pulo Sepang
		3	Prapat Batu Nunggul
		4	Kuta Batu Baru
		5	Kuta Batu Satu
		6	Kuta Batu Ii
		7	Rih mbelang
Penungkunen	Satumin, S	1	Pintu Khimbe
		2	Lawe Sempilang
		3	Cingkam I
		4	Cingkam Ii
		5	Cingkam Meranggun
		6	Darul Amin
		7	Pulo ndadap
Ngkeran	Masri	1	Lawe Lubang Indah
		2	Pasar Bangun
		3	Pair Nunggul
		4	Ngkeran
		5	Batu Hamparan
		6	Kubu
		7	Lawe Kongkir

Ladang Misik	Satumin	1	Paekh Pekhmate
		2	Muara Baru
		3	Paye Munje
		4	Rumah Kampung
		5	Pasir Nunang
		6	Deleng Kukusen
		7	Lawe Kongkir Hilir

Sumber : Kantor Camat Lawe Alas

Tabel 2.3 Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun Dan Nama Kepala Dusun Di Kecamatan Lawe Alas Tahun 2020

No	Nama Desa	Nama Kepla Desa	Nama Sekdes	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Hamparan	Aliyas	Abdul Gani	Dusun Alur Pangguh	Iuanda
2				Kepiyeh Ijo	Dullah
3				Batu Hamparan	Joni Iskandar
4	Cingkam Mekhanggun	Suharto	Ruslan	Darul Imam	Haddin
5				Rumah Luar	Zenal Abidin
6				Cingkam Mekhanggun	Hanudin
7	Darul Amin	Supriadi,Spd	Juwendi	Rambutan	Darmawan syah
8				Bahagia	Kadek, M
9				Cingkam	M.Teknis
10				Jambu	Rayudin
11	Deleng Kukusen	Bahudin	Samsul Bahri	Batu Garut	Ramadani
12				Lawe Lubang	Syukrianto
13				Simpang Tiga	Ramashansyah
14	Kubu	Zakanedi	Zulkipli, S.Hi	Datuk Mugan	Hasanudin

15				Ronding	Jul Kadri
16				Rumah Pinim	Saukani Ahmad
17	Kuta Batu 1	Sehmuhammad Amin	Suni Abdillah	Lisung Gening	Junaidi
18				Pandenan	Ibrani Kadir
19				Tengah	Samidin
20				Kute	Khori Iskandar
21	Kuta Batu Li	Suratman	Anuarsyah	Tanah Lapang	Syeh Jalaludin
22				Pasir	Budiman
23				Lawe Piyo	Hamdani
24				Parit Botong	Muhlis
25	Kuta Cingkam I	Suhardi	Suhardi	Pengulu Bebas	Juhari
26				Paye Bundung	Parlan Antoni
27				Gadung Germe	Sabran Iswandi
28	Kuta Cingkam Li	Alimin	Alimin	Kampung Jernih	Iskandar
29				Liang Pangi	Muhtadin
30				Haji Mat Seman	Salimin
31				Datuk Malim	Rajani
32	Lawe Kongker	Salimin	Salimin	Raja Muda	Ralidin
33				Layar Tunggal	Yusbi Afan
34				Kute Nuntu	Nurniarti Ningsih
35				Suka Makmur	Zulfian
36	Lawe Kongker Hilir	Bahudin	Supriadi	Limo Mungkur	Hasan Sahri
37				Simpang Telu	Kasiman
38				Layar Tunggal	Amrin
39				Limo Munthe	Ajerai Mu'arif
40	Lawe Lubang Indah	Sabirinsyah	Ali Imran., A.Ma.	Ramud	Sahipin Indra
41				Pinim	Supandi
42				Limo Mungkur	M.Soni Indra

43				Sepakat	Tawarudin syah
44	Lawe Sempilang	Sahdian Hasbi	Sahdiah Hasbi	Dukhase	Rabu'in
45				Bebas	Salidin
46				Lawe Sumur	Agus Arianto
47	Muara Baru	Satumin.,S. Hi	Silahudin	Payung	Ali Ucok
48				Angrek	Jeminah
49				Melati	Sandra Wadi
50				Lintas	Salamudin
51	Ngkeran	Mishar	Ardan	Rumah Sagi	Bunda
52				Sigem	Lilis Riani
53				Nanggung	Marhaban Fikar
54	Pasikh Pekhmate	Iskandar Zulkarnaen	Suhaimi	Pasir	Nasbun Najar
55				Gelam	Cari Mudin
56				Juhar	Laidin Said
57	Pasir Bangun	Sudirman, Se	Masidah	Belah Cuah	Rabidun
58				Belah Gugung	Asdan Selian
59				Terminal	Dusani
60				Rumah Kampung	Saludin
61	Pasir Nunang	Rasidin	Kamal	Lawe Garut	Sudarman
62				Lawe Sigem	Hamdan
63				Lawe Nodi	Rabumin
64	Pasir Nunggul	Sukran	Iwan Sah Putra	Enggut	Zenal Abidin
65				Khukahan	Ilham
66				Pasir	Mahmudin
67				Hakhapan	Hasnul Azis
68	Paye Munje	Bukhari	Zailani	Paye Kubur	Oden Saleh
69				Paye Tunggal	Januar Efendi
70				Paye Kembang	Asri
71				Paye Suluh	Pajar Kadapi
72	Prapat	Salamandi .,	Baikuni.	Cingkam	Antoni

	Batu Nunggul	S.Pdi	S	Runggu	
73				Pulo Numbung	Sapuan
74				Deleng Dewal	Samsir Wadi
75				Pintu Khimbe	Salihin
76				Kayu Mbelin	Alhamudin
77	Pintu Khimbe	Rasidan	Indra Gunawan	Khutung Permai	Susilo Sudarmon o
78				Ukhung Batu	Rauli Antoni
79				Kadus Bawah	Sadhidin
80	Pulo Gadung	Jumadin, S	Sabidin	Bulu Pancur	M.Syahril
81				Paye Gelime	Sadikin
82				Kadus Syah Juhum	Lina Jati
83	Pulo Ndadap	Insan Basri	Darussalam	Kadus Melati	Siti Hajar
84				Kadus Serantai	M.Efendi
85				Kadus Mawar	Kamusliadi
86				Lawe Sarap	Supkiadi
87	Pulo Sepang	Iskandarsyah	Iskandarsyah	Trantaji	Tamrun
88				Peye Gantung Mas	Kamidin
89				Makmur	Harmoko
90				Lawe Piyo	Suhada
91	Rih Mbelang	Sahbudin	Sahbudin	Biak Mentelang	Kaman Sari
92				Rih Mbelang	Sastra Wijaya
93				Katik Mahar	Supardi Hustam
94	Rumah Kampung	Juanda	Hanipan Selian	Lawe Agang	Pajri
95				Ladang Juhar	Darsono

Sumber : Kantor Camat Lawe Alas

Tabel 2.4 Jarak Desa di Kecamatan Lawe Alas terhadap Kantor Camat, Kantor Polsek dan kantor Koramil (Km)

NO	Desa	Jarak Ke (KM)	
		Ibukota Ke Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muara Baru	1,6	14,6
2	Pasir Bangun	-	13,1
3	Engkeran	1,2	13,2
4	Lawe Kongkir	1,9	13,7
5	Kubu	2,8	14,1
6	Kuta Cingkam Ii	1,9	11,2
7	Kuta Cingkam I	2	11,1
8	Lawe Sempilang	2,8	10,3
9	Kuta Batu Ii	3,6	9,5
10	Kuta Batu I	4,4	8,7
11	PrapatBatu Nunggul	5,6	7,5
12	Pulo Sepang	6,8	6,3
13	Paya Munje	2,1	15,1
14	Darul Amin	0,4	12,7
15	LaweLubang Indah	3,2	15,1
16	Batu Hamparan	3,7	15,1
17	Rih Mbelang	4	9,1
18	Kute Batu Baru	4,7	8,4
19	Rumah Kampung	3,2	14,2
20	Pasekh Pekhmate	1,1	14,1
21	Pasir Nunggul	0,5	13,6
22	Lawe Kongkir Hilir	2,4	14,3
23	Pulo Ndadap	2,6	10,5
24	Pintu Khimbe	3,7	9,4
25	Pulo Gadung	7,9	5,2
26	Cingkam Meranggun	0,7	12,4
27	Pasir Nunang	3,9	17,3
28	Deleng Kukusen	4,3	16,2

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka 2017*

Tabel 2.5 Fasilitas Yang Dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dirinci Perdesa dalam kecamatan lawe alas

No	Desa	kantor pemerintahan	Balai Desa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muara Baru	-	1	-
2	Pasir Bangun	1	1	-
3	Engkeran	-	1	-
4	Lawe Kongkir	-	1	-
5	Kubu	-	1	-
6	Kuta Cingkam II	-	1	-
7	Kuta Cingkam I	-	1	-
8	Lawe Sempilang	-	1	-
9	Kuta Batu II	-	1	-
10	Kuta Batu I	-	1	-
11	Prapat Batu Nunggul	1	1	-
12	Pulo Sepang	-	1	-
13	Paya Munje	-	1	-
14	Darul Amin	-	1	-
15	Lawe Lubang Indah	-	1	-
16	Batu Hamparan	-	1	-
17	Rih Mbelang	-	1	-
18	Kute Batu Baru	-	1	-
19	Rumah Kampung	-	1	-
20	Pasekh Pekhmate	-	1	-
21	Pasir Nunggul	-	1	-
22	Lawe Kongkir Hilir	-	1	-
23	Pulo Ndadap	-	1	-
24	Pintu Khimbe	-	1	-
25	Pulo Gadung	-	1	-
26	Cingkam Mekhanggun	-	1	-
27	Pasir Nunang	-	1	-
28	Deleng Kukusen	-	1	-

Sumber : BPS Kab Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka 2017*

#### D. Jumlah Penduduk Kecamatan Lawe Alas

Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Lawe Alas

NO	Desa	Jenis kelamin		Jumlah	Rasio jenis kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Baru	279	320	599	87.19
2	Pasir Bangun	477	541	1 018	88.17
3	Ngkeran	385	453	838	84.99
4	Lawe Kongkir	442	454	896	97.36
5	Kubu	396	462	858	85.71
6	Kuta Cingkam II	409	392	801	104.34
7	Kuta Cingkam I	334	376	710	88.83
8	Lawe Sempilang	233	251	484	92.83
9	Kuta Batu II	577	568	1 145	101.58
10	Kuta Batu I	393	395	788	99.49
11	Prapat Batu Nunggul	565	562	1 127	100.53
12	Pulo Sepang	371	406	777	91.38
13	Paya Munje	212	227	439	93.39
14	Darul Amin	360	365	725	98.63
15	Lawe Lubang Indah	158	166	324	95.18
16	Batu Hamparan	186	218	404	85.32
17	Rih Mbelang	384	360	744	106.67
18	Kute Batu Baru	456	463	919	98.49
19	Rumah Kampung	285	283	568	100.71
20	Pasekh Pekhmate	193	199	392	96.98
21	Pasir Nunggul	208	230	438	90.43
22	Lawe Kongkir Hilir	161	201	362	80.10
23	Pulo Ndadap	261	268	529	97.39
24	Pintu Khimbe	222	222	444	100.00
25	Pulo Gadung	198	226	424	87.61
26	Cingkam Meranggun	225	267	492	84.27
27	Pasir Nunang	274	286	560	95.80
28	Deleng Kukusen	221	221	442	100.00
	Lawe Alas	8 865	9 382	18 247	94.49

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka 2017*



Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Lawe Alas

NO	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rata Rata Anggota Rumah Tangga (Jiwa )
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muara Baru	109	5
2	Pasir Bangun	191	5
3	Ngkeran	141	6
4	Lawe Kongkir	154	6
5	Kubu	154	6
6	Kuta Cingkam II	137	6
7	Kuta Cingkam I	137	5
8	Lawe Sempilang	95	5
9	Kuta Batu II	208	6
10	Kuta Batu I	146	5
11	Prapat Batu Nunggul	208	5
12	Pulo Sepang	142	5
13	Paya Munje	78	6
14	Darul Amin	147	5
15	Lawe Lubang Indah	60	5
16	Batu Hamparan	90	4
17	Rih Mbelang	125	6
18	Kute Batu Baru	161	6
19	Rumah Kampung	96	6
20	Pasekh Pekhmate	70	6
21	Pasir Nunggul	92	5
22	LaweKongkir hilir	68	5
23	Pulo Ndadap	100	5
24	Pintu Khimbe	79	6
25	Pulo Gadung	75	6
26	Cingkam Meranggun	95	5
27	Pasir Nunang	99	6
28	Deleng Kukusen	77	6
	<b>Lawe Alas</b>	<b>3 334</b>	<b>5</b>

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka* 2017

Tabel 3.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lawe Alas

<b>NO</b>	<b>Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0–4	1 047	1 053	2 100
2	5–9	1 175	1 108	2 283
3	10–14	1 254	1 258	2 512
4	15–19	1 071	1 085	2 156
5	20–24	700	770	1 470
6	25–29	660	775	1 435
7	30–34	621	697	1 318
8	35–39	600	713	1 313
9	40–44	518	575	1 093
10	45–49	379	457	836
11	50–54	312	301	613
12	55–59	183	162	345
13	60–64	128	131	259
14	65–69	73	93	166
15	70–74	64	77	141
16	75+	80	127	207
	<b>Jumlah</b>	<b>8 865</b>	<b>9 382</b>	<b>18 247</b>

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *kecamatan lawe alas dalam angka 2017*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Landasan Hukum Pemberlakuan *Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi* Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh**

Landasan pemberlakuan *Restorative Justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara mengacu pada undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 7 Tahun 2000 , pasal 10 menegaskan bahwa “ aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geucik (*penghulu*) dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa / perselisihan di kute (desa) /mukim masing-masing”. Pada pasal 11, ayat (1) berbunyi “*penghulu* berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan atau permasalahan yang terjadi di kute (desa) , baik maslah-masalah dalam keluarga, antar keluarga, dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat kute (desa) dalam hal ini rapat adat alas. Pada ayat (2) menegaskan “”apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat di selesaikan di kute (desa) atau para pihak tidak menerima yang bersengketa tidak dapat menerima putusan adat tingkat *penghulu*, maka perselisihan sengketa tersebut di selesaikan oleh imum mukim dalam rapat adat mukim.

Tatacara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan / atau persengketaan, di laksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing.--

masing daerah, dalam hal ini secara adat alas. Pasal 14 ayat(2) menegaskan bahwa “ para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat pada tingkat penghuku atau imum mukim, ia akan di kenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kata kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa “ dalam jangka waktu 1 (satu) bulan imum mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih atau bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat mukim, maka isi dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum atau polisi”. Pasal yang sama pada ayat (2) “ keputusan data yang telah di jatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat di jadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara”. Pasal 24 berbunyi “aparat pemerintah yang berasal dari luar daerah dan bertugas di aceh, khususnya di tanah alas, harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat alas dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat" demikian jelasnya aturan di atas, dengan demikian masyarakat adat alas dapat mengisi peluang ini demi kemaslahatan di masa mendatang.<sup>80</sup>

Pemberlakuan *restorative justice* jelas terlihat dalam penyelesaian kasus- penganiayaan sengaja yang di mana pada prinsipnya hukuman bagi seorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja dalam hukum pidana adalah di *qisas*

---

<sup>80</sup> BPS kab.aceh tenggara dalam angka 2017

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ  
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ ....

*Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ....”(Al Maidah Ayat 45)<sup>81</sup>*

dalam ayat di atas hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu ada balsannya seseuai dengan apa yang di lakukannya, jika di lihat dari aspek teori keadilan hukuman tersebut memenuhi sifat keadilan kodrat alam yang di kemukakan oleh aristoteles <sup>82</sup>oleh sebagian kalangan hukuman yang di terapkan oleh syariat islam itu sangat ekstrim sehingga banyak di tentang oleh kelompok-kelompok tertentu dan mungkin saja mereka belum memahami aturan hukum yang di terapkan dalam syariat islam tersebut.

Sedangkan Eldin H. Zainal, dalam bukunya yang berjudul. *Hukum Pidana Islam*, menurut dalam buku tersebut bahwa beliau berpendapat bahwa hukum pidana Islam sebenarnya tidaklah sadis dan amgker, sebagaimana disimpulkan oleh sebagian orang yang tidak mengerti. Islam lebih mengutamakan tindakan proventif agar manusia tidak terjebak ke dalam tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Hukum Islam lebih manusiawi dan beradab,

<sup>81</sup> Dapertemen Agama RI, h.115

<sup>82</sup> Keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam seperti perbuatan baik akan di balas dengan baik juga

dibandingkan dengan praktik yang terjadi di negara-negara Barat yang katanya sangat menghargai kebebasan dan hak asasi manusia.<sup>83</sup>

Dan Makhrus Munajat, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah; Norma-norma Hukum Pidana Islam*, menolak anggapan tentang bahwa hukum Islam adalah sadis, jauh dari nilai kemanusiaan. Dalam buku tersebut mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam tentang masalah pemidanaan dan menaktualisasikan kembali dalam kajian yang lebih komprehensif, dan penerapannya sebagaimana yang dijalankan Nabi SAW.<sup>84</sup>

Dalam ayat lain di jelaskan bahwasannya dalam hukuman *qisas* di terangkan akan pentingnya terjaminnya rasa ke amanan dalam kehidupan sehari hari baik dalam ibadah, muamalah, dan masih banyak lagi dan di tegaskan kembali bahwannya allah menyeru orang-orang yang berakal, sesuai dengan surah al-baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Al-Baqarah Ayat 179).<sup>85</sup>

Dalam ayat yang lain di jelaskan dalam al baqarah ayat 178

<sup>83</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017), h. 12

<sup>84</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-norma Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008), h. 158

<sup>85</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah, dep.agama RI., *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: proyek pengadaan kitab suci al-quran, 1985), hlm. 43

... فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

*Artinya: ...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Al-baqarah [2] : 178)<sup>86</sup>*

Dari ayat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwasannya hukum islam tidak se ekstrim yang di bayangkan oleh kalangan tertentu karena dimana masih ada pintu pemaafan yang di buka lebar yaitu dengan di jatuhkannya *diyat* bagi pelaku tindak pidana.

Sementara itu penerapan *diyat* bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja dengan cara *restorative justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara lebih mirip kepada system *diyat* yang di terapkan dalam hukum islam yaitu seorang pelaku tindak pidana akan di hukum sesuai dengan ketentuan berat dan ringannya suatu perbuatan yang di lakukan, yang membedakannya adalah hukuman *diyat* yang di berlakukan di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh lebih mengarah memperbaiki hubungan yang di timbulkan dari hasil perbuatan tersebut dengan cara membayar ganti rugi sejumlah biaya perobatan dan denda lainnya yang nominalnya tidak terlalu besar dan hukuman

<sup>86</sup> Dapertemen Agama RI, h.27

tersebut menjadi *taadib* (pembelajaran ) bagi yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak jarang setelah terjadinya *diyat* pelaku mengangkat korban menjadi anak angkatnya,/saudara angkat nya.

sedangkan hukuman *diyat* yang di berlakukan dalam hukum pidana islam pada prinsipnya dendanya sangat besar untuk suatu perbuatan pidana yang di maafkan dan akhirnya dengan adanya hukuman *diyat* tersebut membuka peluang bagi pelaku-pelaku tindak pidana untuk di jatuhkannya hukuman *diyat* seperti yang berdi lihat dari kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia rasanya masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu maka sulit untuk di terapkannya hukum tersebut yang selanjutnya pada prinsip di terapkannya guna mencapai suatu penyelesaian kasus hukum yang lebih baik yang tercermin

## **B. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja**

ada beberapa paktor penyebab terjadi nya penganiayaan sengaja yang penulis temukan di lapangan<sup>87</sup>

1. berselisih paham menjadi penyebab terjadinya penganiayaan
2. perlakuan yang tidak mengenakan dari seseorang yang di mana kejadian itu berlangsung tanpa adanya perencanaan.
3. Seseorang yang dalam keadaan mabuk sering kali berbuat di luar batas kesadarannya

---

<sup>87</sup> Zulkarnaen, kepala desa pasikh pekhmate, 2020



### C. Analisa Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Sengaja Di Daerah Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Ketentuan besarnya hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara di konversi dari harga emas murni di daerah tersebut dan perhitungannya :

Tabel 4.1 bentuk hukuman bagi pelanggaran ringan

No	Kriteria	Jumlah/ Mayam	Jumlah (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat Ini /Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin, Penengah	0,04	120000	3.000.000
2	Kelas Menengah	0,4	1200000	
3	Kelas Atas /Orang Kaya	4	12000000	

Tabel 4.2 pelanggaran sedang

No	Kriteria	Jumlah/ Mayam	Jumlah (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat Ini /Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin, Penengah	0,08	240000	3.000.000
2	Kelas Menengah	0,8	2400000	
3	Kelas Atas /Orang Kaya	8	24000000	

Tabel 4.3 pelanggaran berat

No	Kriteria	Jumlah/ Mayam	Jumlah (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat Ini /Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin, Penengah	0,016	48000	3.000.000

2	Kelas Menengah	0,16	480000
3	Kelas Atas /Orang Kaya	16	48000000

Dan telah di taksirkan kembali mengenai hukuman di atas oleh ketua MAA tingkat kabupaten mengenai hukuman yang berlaku dan di jalankan oleh ketua MAA tingkat desa sebagai berikut<sup>88</sup> :

Tabel 4.4 hasil analisis para ketua MA aceh tenggara

No	kriteria perbuatan	sebutan denda	jumlah denda (Rp)
1	2	3	4
1	ringan	8	800.000
2	Sedang	16	1.600.000
3	Berat	32	3.200.000

Ket :

1. Kriteria perbuatan **penganiayaan ringan** yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka memar atau lecet di bagian luar tubuh dari pusar hingga kaki dan perbuatan ini disebut dengan denda *pe waluhén* dan jumlah dendanya berkisar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah )
2. Kriteria perbuatan penganiayaan sedang yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka di bagian leher hingga pusar dan perbuatan ini disebut dengan denda *pe enambelasan* dan jumlah dendanya berkisar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
3. Kriteria perbuatan penganiayaan berat yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka di bagian kepala hingga leher dan perbuatan ini di

<sup>88</sup> Muslim, ketua adat di kecamatan lawe alas, wawancara pribadi, 22 oktober 2020

sebut dengan denda *pe teludue* dan jumlah dendanya berkisar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah )

hukuman *diyat* bagi pelaku penganiayaan secara sengaja yang di laksanakan di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara adalah salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana ringan secara *restorative justice* yang di mana ada proses yang di harapkan tumbuh dari sekelumit acara sidang yang di lakukan di daerah tersebut yaitu terciptanya rasa persaudaraan dengan cara tertentu dengan adanya batas denda yang telah di sepakati seperti denda bagi orang yang melakukan tindak pidana dendanya di bedakan antara bagian kepala, perut dan kaki dan mengenai jumlah besaran dendanya akan di putuskan dari hasil kesepakatan dalam persidangan.

Pada prinsipnya hukum adat di buat tidak untuk memberatkan kedua belah pihak dan tidak juga mengesampingkan kepentingan korban dan terbukti dengan adanya hukuman denda bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adanya kewajiban pelaku untuk membawa korban kerumah sakit dan bertanggung jawab akan biayanya atau menurut kesepakatan kedua belah pihak, hal ini selaras dengan tujuan di syariatkannya hukum islam yaitu:

1. Terjaganya agama maksudnya ialah Hukuman *diyat* yang di terapkan di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara jelas dapat menjaga agama karena yang melakukan tinak pidana akan di hukum sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan

2. Terjaganya jiwa maksudnya ialah dalam proses penerapan hukuman di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara tercermin dengan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan keluarga tokoh-tokoh desa yang di harapkan tidak adanya dendam sehingga mengancam jiwa
3. Memelihara akal maksudnya adalah ketika kasus tindak pidana yang di selesaikan dengan cara *restorative justice* di daerah tersebut di harapkan mampu menjadi tolak ukur oleh masyarakat karena hukuman yang ada sudah sangat manusiawi dan menurut kesepakatan yang paling adil antara kedua belah pihak
4. Memelihara keturunan di sini dapat di katakana silaturahmi antara sesama muslim akan bertambah karena setelah tindak pidana penganiayaan ada perwakilan dari pihak keluarga pelaku datang membesuk dengan membawa bekal yang di sebut dengan sebutan *nakan sekhimah sope sekphanting* ( masakan lauk pauk yang di buat dalam rantang )
5. Memelihara harta di sini maksudnya perbuatan pidana dalam proses penjatuhan hukuman dalam persidangan sangat memperhatikan keadaan dari pihak pelaku tidak serta merta denda yang di jatuhkan membuat pelaku serba kesulitan dalam memnuhi kebutuhan sehari-harinya karena pembayaran denda akan di lakukan sesuai dengan kesepakatan dalam persidangan.

Jadi menurut penulis setelah melakukan penelitian di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh yang di mana anggapan awal penulis bahwasannya hukuman yang terlalu ringan menyebabkan terjadinya pidana

terbantahkan karena menurut keterangan dari beberapa pihak mulai dari kepala desa sampai tokoh adat dan penulis simpulkan bahwasannya kejadian penganiayaan sengaja jarang terjadi dan jika pun terjadi biasanya Karena hal sepele.

Untuk selanjutnya mengenai penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sengaja melalui *restorative justice* di kecamatan lawwe alas kabupaten aceh tenggara yang semula penulis beranggapan tidak sesuai dengan hukum pidana islam ternyata benar adanya karena hukuman *diyat* yang ada dalam hukum pidana islam nominalnya sangat tinggi dan tujuannya supaya jera pelaku sedangkan hukuman *diyat* yang di terapkan di kecamatan lawe alas dendanya tidak terlalu besar sesuai dengan kemampuan yang di tafsirkan oleh para tokoh desa dan tujuan di buatnya hukuman *diyat* di kecamatan lawe alas tersebut bukan untuk menyusahkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

berdasarkan penjelasan di atas, setelah penyusun melakukan penelitian sepenuhnya tentang jenis pidana dan penyelesaiannya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Terjadinya *al jarmh al'andi* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara provinsi aceh bukan karena hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku tetapi melalui proses yang singkat yaitu hanya hal yang biasa seperti kesalah pahaman, ketidak sengajaan yang membuat seseorang tersinggung, mabuk dan masalah ini bisa teratasi dengang di laporkannya ke geucik (kepala desa) dan kepala desa memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dan membuat siding di desa dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan para pemuka adat dan masyarakat setempat dan mengadilinya, pada intinya proses yang berjalan dan hasil siding yang di dapatkan akan di terima oleh kedua belah pihak dan mereka akan kembali seperti semula lagi dengan tidak merasa ada yang tezholimi hal ini terjadi karena masyarakat di sana pada dasarnya sangat mencintai perdamaian.
2. Ternyata islam sudah lebih dulu mengenal restorative justice seperti yang tertuang dalam teori pembedaan yang di anut oleh sebagian Negara seperti Indonesia yang memasukkan keadilan restorative justice pada UU No 11 Tahun 2012 Dan Perkap No 6 Tahun 2019

yang di harapkan mampu menjadi cerminan tentang arah pemidanaan di Negara Indonesia ini terlebih lagi sudah di terapkan di daerah-daerah tertentu seperti kabupaten aceh tenggara

3. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sengaja melalui *restorative justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara tidak sepenuhnya menggunakan konsep hukum pidana islam karena penulis menilai konsep yang di terapkan di daerah tersebut berbeda dari konsep hukum pidana islam seperti seperti konsep diyat, diyat yang di terapkan di kecamatan lawe alas tersebut terbilang kecil tidak sebanding dengan diyat yang di terapkan dalam hukum pidana islam yang tergolong besar. Dan hukuman bagi pelaku penganiayaan sengaja melalui *restorative justice* di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara lebih dekat kepada ta'zir karena hukuman yang di terapkan di kecamatan lawe alas tersebut tidak sesuai dengan konsep diyat, kendati pun demikian hukuman yang di terapkan di kecamatan lawe alas tersebut sudah di tetapkan akan tetapi implementasinya semata-mata hasil pertimbangan sidang/musyawarah desa.

#### B. Saran-saran

Saran –saran yang dapat penulis berikan setelah meneliti tentang hal tersebut di atas antara lain

- 1) Bagi pemangku tertinggi MAA (majelis adat aceh) agar seoptimal mungkin mengadakan pelatihan bagi generasi muda yang ada di wilayah aceh khususnya di aceh tenggara supaya generasi penerus

bangsa menjadi cakap dalam melaksanakan hukum adat yang berlaku di Aceh terkhususnya di Aceh Tenggara

- 2) Bagi masyarakat di daerah tersebut agar senantiasa mentaati segala peraturan yang telah ada guna terciptanya keamanan dan kekompakan di antara masyarakat .

### C. Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Restorative Justice Al-Jarmh Al Amdi* (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara). Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi di waktu mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

Agama RI, Dapertemen, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016

Albani, Syukri, *filisafat hukum islam*, cet.3. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960

Aries, Albert, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Dan Keadilan Restoratif*,  
Ajalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim  
Indonesia, Juni 2006

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
*Rieneka Cipta*, 1998

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 1, Cet-Ke 1,  
Depok: Keira, 2016

Audah, Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, Cairo: Daar Hadits, 2009

Barda, Muladi dan Nawawi Arif, *Teori• teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni;  
Bandung, 1984

BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Lawe Alas Dalam Angka 2018*

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo,  
2002

Djazuli,Ahmad, *fiqih jinayah*, upaya menanggulangi kejahatan dalam islam,  
Jakarta: 1997

Eva Achjani Zulf, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia: 2009, Jakarta,

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: BulanBintang, 1990

*Handbook On Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006,

Indriyanti, Eva Achjani Zulfa dan Seno Adji,*Pergeseran Paradigma Pemid  
anaan*, Lubuk Agung; Bandung,2010

Johnstone Dan Ness, Van, *The Meaning Of Restorative Justice*, Makalah Untuk  
Konfrensi Lima Tahunan PBB Ke-11, Workshop 2, : 2005,Bangkok-  
Thailand

Jonaedi, Efendi Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,  
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-norma Hukum Islam*, Yogyakarta:  
Fakultas Syariah Press, 2008

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar  
Grafiti, 2000

Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers:  
2007

Muh Irfan, Wahid Abd, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001

Muladi, Arief nawawi barda, *teori-teori dan kebijakan pidana* cet.2010  
P.T.ALUMNI: bandung,2010

Muslim, Ketua Adat Di Kecamatan Lawe Alas, Wawancara Pribadi, 22 Oktober 2020

Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Perbup Aceh Tenggara No 21 Tahun 2015

Rahman, Abdur I Do'i, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Rusyd, Ibnu , *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3*, Terj. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa', 1990

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, Cet. II, 1987

Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung:Pustaka Setia,2013

Santoso,Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam*  
PT raja grafindo persada ,1997

Soleh, Nor,"*Restorative justice* ," ISTI'DAL: jurnal studi hukum islam,vol.2.no 2  
juli-desember 2015 di akses pada senin, 19 oktober 2020

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarta FH Undip, 1990

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung, Alfa Beta, 2016

Sunarso, H.Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: 2014, Jakarta,

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Preda Media, 2003

Van.J.Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukumpidana*, Universitas Trisakti: 2009 Jakarta,

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2016

Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Zaidan, Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Zainal, Eldin H., *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017

Zulkarnaen, Kepala Desa Pasikh Pekhmate, 2020

## LAMPIRAN

10/21/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTA0NDQ=>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.957/FSH.III/PP.00.9/9/2020  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

21 Oktober 2020

Yth. Bapak/Ibu Kepala KA camat Lawe alas

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Tarmizi Dahmi  
NIM : 0205163146  
Tempat/Tanggal Lahir : Juhar Baru, 04 April 1997  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (jinayah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : PASIKH PEKHMATE Kelurahan PASIKH PEKHMATE Kecamatan LAWE ALAS

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kecamatan Lawe alas, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

*Tinjauan hukum pidana Islam terhadap restorative justice al-jarm al'andi (studi kasus kecamatan Lawe alas kabupaten Aceh tenggara provinsi Aceh)*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 21 Oktober 2020  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTA0NDQ=>

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

**CAMAT LAWE ALAS**

کنتورچامت لوي ألس

Jln Kutacane-Salim Pipit Desa Pasir Bangun Nomor Kode Pos 24661 Email :

**REKOMENDASI**

Nomor: 500/472020

Berdasarkan surat Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) Nomor : B.957/FSH.III/PP.00.9/0/2020 Tanggal 14 September 2020 Prihal Izin Riset Untuk Mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU) atas nama : **TARMIZI DAHMI NIM. 0205163146 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Semester IX (sembilan)** Alamat Desa Pasikh Pekhmate Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

Maka untuk memenuhi maksud diatas pihak kami tidak menaruh keberatan dan mendukung sepenuhnya dan memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan riset di wilayah kami sepanjang tidak bertentangan dengan perturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasir Bangun 21 September 2020  
CAMAT LAWE ALAS  
  
**SUDIRMAN, SE**  
Pembina IV/a NIP. 19720702 199110 1002











## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tarmizi Dahmi  
 Tempat/Tgl. Lahir : Juhar Baru, 04 April 1997  
 Nim : 0205163146  
 Fakultas /Jurusan : Syariah Dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nama Ayah : Hakimin  
 Nama Ibu : Latipah  
 Alamat : Pasikh Pekhmate Kec.Lawe Alas Kab Aceh Tenggara  
 Pendidikan :  
 1. SDN Darul Amin, Tamat Tahun 2009  
 2. MTs Negeri Engkeran, Tamat Tahun 2012  
 3. MAN Lawe Alas, Tamat Tahun 2015  
 4. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Stambuk . 2016

Penulis, 03 Oktober 2020

TARMIZI DAHMI

NIM. 0205163146